



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN



RENJA

RENCANA KERJA PERUBAHAN

DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN
RUANG KABUPATEN KEBUMEN

2025

KATA PENGANTAR

Penyusunan Rancangan Perubahan Rencana Kerja Tahun 2025 merupakan rangkaian penyempurnaan pembiayaan belanja guna mendukung pelaksanaan program kegiatan yang telah dan akan dilaksanakan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kebumen dalam memberikan pelayanan pada sektor infrastruktur tahun 2025 dan menjadi dasar pedoman penyusunan Rencana Kerja Perubahan dan Anggaran (RKAP) dan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA)

Dalam dokumen Rencana Kerja Perubahan Pemerintah Daerah Tahun 2025, DPUPR Kabupaten Kebumen terdapat total pendanaan tahun 2025 adalah sebesar Rp. 211.364.976.583,- atau bertambah Rp. 38.774.268.494 Dari sebelumnya Rp. 172.590.708.089,-. Pagu dana tersebut dirancang untuk membiayai program yang selaras dengan pencapaian visi misi daerah terutama misi ke-4 yaitu peningkatan kualitas dan kuantitas infrastruktur yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan.

Adapun Indikator Sasaran Kinerja Utama DPUPR Kabupaten tahun 2025 ada dua yaitu satu indeks Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Indikator tertanganinya kasus sengketa lahan. dimana indikator tersebut merupakan salah satu pendukung utama Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang berkaitan dengan Indeks Infrastruktur Daerah dan indeks kepuasan masyarakat.

Semoga dokumen Rencana Kerja ini dapat dipedomani bersama untuk meningkatkan kualitas kinerja DPUPR Kabupaten Kebumen.

Kebumen, 26 Juni 2025
KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM
DAN PENATAAN RUANG
KABUPATEN KEBUMEN

JONI HERNAWAN, ST., MT.
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19700728 199803 1 006

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR..... i

DAFTAR ISI..... ii

DAFTAR TABEL iii

DAFTAR GAMBAR..... iii

DAFTAR LAMPIRANiv

BAB I 1

PENDAHULUAN 1

 1.1. Latar Belakang..... 1

 1.2 Landasan Hukum 1

 1.3 Maksud dan Tujuan..... 3

 1.4 Sistematika Penulisan..... 4

BAB II 6

HASIL EVALUASI RENCANA KERJA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN
PENATAAN RUANG S/D TRIWULAN II TAHUN 2025 6

 2.1. Hasil Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Dinas Pekerjaan Umum
 dan Penataan Ruang Tahun 2025 dan Capaian Rencana Strategis
 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang s/d Triwulan II .. 6

BAB III 18

RANCANGAN PERUBAHAN RENCANA KERJA DAN PENDANAAN
PERANGKAT DAERAH 18

BAB V 64

PENUTUP..... 64

LAMPIRAN 65

DAFTAR TABEL

Tabel 2. 1 T-C.29 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Periode Pelaksanaan Triwulan II Tahun 202514

Tabel 3. 1 Rancangan Perubahan Rencana Kerja dan Pendanaan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kebumen Tahun 2025..... 26

DAFTAR LAMPIRAN

LAMPIRAN 1 PRINT OUT RKPD PERUBAHAN 2025..... 66

LAMPIRAN 2 PRINT OUT USULAN POKIR PERUBAHAN TAHUN 2025... 82

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Perencanaan menduduki peran penting dalam rangka percepatan pencapaian visi dan misi pemerintah daerah yang keseluruhannya akan menuju pada satu tujuan yakni kesejahteraan Masyarakat. Perubahan Rencana Kerja DPUPR Kabupaten Kebumen disusun berdasarkan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Namun demikian dikarenakan dalam masa transisi dan sesuai dengan Pasal 9 Ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025, maka perumusan perubahan Rencana Kerja Tahun 2025 perlu memperhatikan visi, misi, dan program Kepala Daerah terpilih. Alasan dasar disusunnya Rancangan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah adalah hasil evaluasi pelaksanaan program kegiatan, capaian kinerja serta penyerapan anggaran pada Rencana Kerja Perangkat Daerah sampai dengan Triwulan II tahun yang menunjukkan ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan dan situasi terhadap perubahan arah kebijakan penganggaran pada Pemerintah Kabupaten Kebumen khususnya pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dan selanjutnya menjadi pedoman dalam Penganggaran Perubahan Tahun Anggaran 2025.

Secara hierarki penyusunan Rancangan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah merupakan produk dasar bagi penyusunan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, diserasikan dengan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan menjadi pedoman dalam penyusunan Perubahan Rencana Anggaran Pembangunan Belanja Daerah (RAPBD-P). Perkembangan keadaan dan situasi terhadap perubahan arah kebijakan rencana penganggaran pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang yang dimaksud antara lain terkait Pembangunan Infrastruktur Jalan, Irigasi, Drainase, Gedung, dan SPAM.

Untuk itu penyusunan Rancangan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025 merupakan sarana dalam memecahkan masalah yang dihadapi untuk menjawab berbagai isu strategis dan tantangan pelaksanaan pelayanan sektor Infrastruktur di Kabupaten Kebumen yang kemudian diverifikasi untuk memastikan indikator kinerja program kegiatan yang menjadi tanggung jawab Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kebumen telah sepenuhnya tercantum pada rancangan perubahan rencana kerja dimaksud.

1.2 Landasan Hukum

Landasan hukum yang digunakan dalam penyusunan Rencana Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang tahun 2022 antara lain :

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 20 Tahun 2012 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2012 Nomor 20, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 93) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 20 Tahun 2012 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2022 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 188);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 127) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 2 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2024 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 211);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2020 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 170);

9. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 4 Tahun 2021 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2021 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 182);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 7 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 184);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 1 Tahun 2024 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kebumen Tahun 2024-2044 (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2024 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 210);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 11 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2024 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 219);
13. Peraturan Bupati Kebumen Nomor 30 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 37 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2025;

1.3 Maksud dan Tujuan

1. Maksud

Maksud dari penyusunan Rancangan Rencana Kerja Perubahan Tahun 2025 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kebumen adalah untuk memberikan gambaran secara umum tentang kondisi yang ingin dicapai Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kebumen sampai akhir tahun anggaran 2025 serta agar dapat memberikan gambaran program, kegiatan dan sub kegiatan yang akan dilaksanakan dan ingin dicapai berdasarkan target-target kinerja yang telah ditetapkan sampai dengan tahun 2025.

2. Tujuan

Tujuan penyusunan Rencana Kerja Perubahan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, adalah sebagai berikut :

- a. Untuk merumuskan program, kegiatan dan sub kegiatan serta pagu indikatif urusan pekerjaan umum dan urusan pertanahan sesuai tugas pokok dan fungsi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kebumen dalam rangka mewujudkan visi misi Pemerintah Daerah terpilih Kabupaten Kebumen yang telah dan akan dilaksanakan pada Tahun Anggaran 2025;
- b. Memberikan informasi yang komprehensif dan terstruktur terhadap penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kemasyarakatan, khususnya yang menjadi kewenangan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kebumen kepada Bupati Kebumen selaku Kepala Daerah;

- c. Untuk mengukur kemampuan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dalam mencapai target akhir tahun anggaran sesuai ketersediaan sumber daya dan potensi yang dimiliki.;
- d. Menjadi dasar penyusunan KUA dan PPAS serta RAPBD-Perubahan Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2025

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Rencana Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kebumen Tahun 2025 berpedoman pada Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 yaitu:

BAB I. PENDAHULUAN

- a. Latar Belakang (SOT Perangkat Daerah dan Tupoksi)
Mengemukakan pengertian ringkas tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah, proses penyusunan Rencanan Kerja Perangkat Daerah, keterkaitan antara Rencana Kerja K/L dan Rencana Kerja Provinsi/Kabupaten/Kota, serta tindak lanjutnya dengan proses penyusunan RAPBD.
- b. Landasan Hukum
Memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang SOTK, kewenangan Perangkat Daerah, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran Perangkat Daerah.
- c. Maksud Tujuan
Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah.
- d. Sistematika Penulisan
Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Rencana Kerja Perangkat Daerah, serta susunan garis besar isi dokumen.

BAB II. EVALUASI RENCANA KERJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN ANGGARAN 2024

- A. Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Perangkat Daerah dan Capaian Rencana Strategis Perangkat Daerah s/d Triwulan II
Memuat kajian/review terhadap :
 - a. Hasil evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Perangkat Daerah s/d Triwulan II berdasarkan data Simdalev dan Laporan semester I.
 - b. Perkiraan capaian tahun berjalan (tahun 2025), mengacu pada APBD tahun berjalan.
 - c. Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Rencana Strategis 2021-2026 Perangkat Daerah berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Rencana Kerja Perangkat Daerah tahun-tahun sebelumnya.

BAB III. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Berisikan uraian mengenai program kegiatan dan pendanaan yang akan dilaksanakan pada tahun berjalan disertai indikator kinerja program maupun indikator kinerja kegiatan, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif yang dibutuhkan.

BAB IV. PENUTUP

BAB II
HASIL EVALUASI RENCANA KERJA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN
PENATAAN RUANG S/D TRIWULAN II TAHUN 2025

2.1. Hasil Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tahun 2025 dan Capaian Rencana Strategis Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang s/d Triwulan II

Evaluasi Rencana Kerja ditujukan untuk mengidentifikasi sejauh mana kemampuan perangkat daerah melaksanakan program dan kegiatan, mengidentifikasi realisasi pencapaian target kinerja program dan kegiatan yang ada di dalam rencana strategis perangkat daerah, serta hambatan dan permasalahan yang dihadapi, Pagu Anggaran dan Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2025 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang adalah sebesar Rp. 119.937.043.187,- (Seratus Sembilan Belas Miliar Sembilan Ratus Tiga Puluh Tujuh Juta Empat Puluh Tiga Ribu Seratus Delapan Puluh Tujuh Rupiah).

Sampai dengan Bulan Juni atau pada Triwulan II realisasi belanja telah mencapai Rp. 26.472.202.496,- (Dua Puluh Enam Miliar Empat Ratus Tujuh Puluh Dua Juta Dua Ratus Dua Ribu Empat Ratus Sembilan Puluh Enam Rupiah) atau setara dengan 22,07%. Selanjutnya pada tahun 2025 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang melaksanakan urusan pekerjaan umum dan urusan pertanahan, dengan 9 (sembilan) program prioritas dan 1 (satu) Program Penunjang.:

a. Program Prioritas

- 1) Program Penyelenggaraan Jalan;
- 2) Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase;
- 3) Program Pengembangan Jasa Konstruksi;
- 4) Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum;
- 5) Program Penataan Bangunan Gedung;
- 6) Program Penataan Bangunan dan Lingkungannya;
- 7) Program Pengembangan Sumber Daya Air (SDA);
- 8) Program Penyelenggaraan Penataan Ruang; dan
- 9) Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan.

b. Program Penunjang

Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
Adapun capaian kinerja program Prioritas Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang s/d Triwulan II sebagai berikut :

1) Program Penyelenggaraan Jalan;

Dalam pelaksanaan program penyelenggaraan jalan, DPUPR berfokus pada penyelenggaraan jalan dan jembatan kabupaten dengan pagu Rp. 71.137.053.000 dan realiasi s/d triwulan II Rp. 13.679.280.090 atau setara dengan 19,23%, berikut realisasi pekerjaan s/d triwulan II penyelenggaraan program jalan :

a. Penyelenggaraan Jalan Kabupaten

Realisasi Pekerjaan s/d triwulan II telah dilaksanakan pekerjaan Pemeliharaan Rutin Jalan Gombong - Kuwarasan (Desa Kalitengah), Pemeliharaan Rutin Jalan Banjareja - Rogodono (Desa Rogodono), Pemeliharaan Rutin Jalan Kemukus -

Purwodadi (Desa Serut), Pemeliharaan Rutin Jalan Kemujan - Adikarto (Desa Adimulyo), Pemeliharaan Rutin Jalan Kemujan - Adikarto (Desa Adimulyo), Pemeliharaan Rutin Jalan K.H. Ahmad Dahlan (Desa Kebulusan), Penanganan Darurat Ruas Jalan Purwodeso - Petanahan Sta. 0+000 s/d 1+550, Rehabilitasi Jembatan Patemon pada Ruas Jalan Sidomulyo - Patemon, Rehabilitasi Talud Oprit Jembatan Curug pada Ruas Jalan Tembono - Peniron, Rehabilitasi Jembatan Mangir 2 pada Ruas Jalan Karangsembung - Giritirto, Rehabilitasi Jembatan Asahan pada Ruas Jalan Karanggayam - Kebakalan, Pemeliharaan Rutin Jalan Kambalan - Ambal (Desa Kembangawit), Pemeliharaan Rutin Jalan Gentan - Miritpetikusan (Perlintasan Underpass Rel KAI), Pemeliharaan Rutin Jalan Ampih - Lajer (Desa Lajer), Pemeliharaan Rutin Jalan Krakal - Kaligending (Desa Kaligending), Pemeliharaan Rutin Jalan Kemujan - Mangli (Desa Gandusari), Penanganan Darurat Ruas Jalan Giwangretno - Adikarto (Desa Adikarto), Pemeliharaan Berkala Jembatan pada Ruas Kutowinangun - Poncowarno, Pemeliharaan Rutin Jalan Tanjungsari - Nampudadi (Desa Grujugan), Penanganan Darurat Ruas Jalan Selokerto - Buayan, Penanganan Darurat Ruas Jalan Gombong - Kuwarasan, Pemeliharaan Rutin Jalan Karangpoh - Aditirto (Desa Aditirto), Pemeliharaan Rutin Jalan Karanggayam - Klopogodo (Desa Karanggayam), Pemeliharaan Rutin Jalan Dorowati - Podourip (Desa Podourip), Pemeliharaan Rutin Jalan Selokerto - Jatinegara (Desa Selokerto), Pemeliharaan Rutin Jalan Kemujan - Sidobunder (Desa Sugihwaras), Penanganan Darurat Ruas Jalan Purwodeso - Petanahan Sta. 4+550 s/d 8+250, Pemeliharaan Rutin Jalan Lingkar Prembun, Pemeliharaan Rutin Jalan Sidomulyo - Patemon (Desa Sawangan dan Desa Sidomukti), Rehabilitasi Drainase pada Ruas Jalan Sawangan - Padureso (Desa Wonokromo), Rehabilitasi Talud Jalan Tembono - Peniron (Desa Karangpoh dan Desa Jemur), Pemeliharaan Rutin Jalan Rendeng - Jogomertan (Desa Tanjungsari), Pembangunan Talud pada Ruas Jalan Giritirto - Plipitan (Desa Giritirto), Pemeliharaan Rutin Jalan Geblug - Candirenggo (Desa Wonodadi), Pemeliharaan Rutin Jalan Kuwarasan - Puring (Desa Kalipurwo dan Desa Sitiadi), Pembangunan Talud pada Ruas Jalan Karanggayam - Kebakalan, Pemeliharaan Rutin Jalan Sidayu - Lawangawu (Desa Semali), Pemeliharaan Rutin Jalan Petanahan - Puring, Pemeliharaan Rutin Jalan Puring - Kebondalem, Penanganan Darurat Ruas Jalan Buayan - Jladri, Pemeliharaan Rutin Jalan Karanganyar - Adimulyo, Penanganan Darurat Ruas Jalan Karanganyar - Kemujan, Pemeliharaan Rutin Jalan Wero - Semondo, Pemeliharaan Rutin Jalan Potongan Gombong, Pemeliharaan Rutin Jalan Sapta Marga Gombong dan Jalan Gereja Gombong, Pemeliharaan Rutin Jalan Grogol - Jogosimo, Penanganan Darurat Ruas Jalan Adikarso - Sangubanyu, Penanganan Darurat Ruas Jalan Kabekelan - Lembupurwo, Penanganan Darurat Ruas Jalan K.H. Ahmad Dahlan, Pemeliharaan Berkala Jembatan pada Ruas Jalan Karanggayam - Kebakalan, Pelebaran Jembatan Gligak pada Ruas Jalan Peniron - Karanggayam, Rehabilitasi Plat Deuker pada Ruas

Jalan Lingkar Selatan Karangsambung – Sadang, Rehabilitasi Plat Deuker pada Ruas Jalan Karanggayam - Klopogodo (Desa Kedungjati), Rehabilitasi Plat Deuker pada Ruas Jalan Meles – Banjareja, Rehabilitasi Talud pada Ruas Jalan Selokerto – Buayan, Rehabilitasi Plat Deuker pada Ruas Jalan Stadion - Gemeksekti (Desa Karangsari), Pembangunan Plat Deuker pada Ruas Jalan Sidayu - Lawangawu (Desa Semali), Penanganan Darurat Ruas Jalan Karanganyar – Adimulyo, Penanganan Darurat Ruas Jalan Lembupurwo - Pantai (Desa Lembupurwo), Rehabilitasi Box Culvert pada Ruas Jalan Muktisari - Bocor (Desa Tanjungsari).

2) Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase;

Dalam pelaksanaan program pengelolaan dan pengembangan sistem drainase, DPUPR berfokus pada perbaikan drainase kewenangan kabupaten dengan pagu sebesar Rp. 1.630.773.417,- (satu milyar enam ratus tiga puluh juta tujuh ratus tujuh puluh tiga ribu empat ratus tujuh belas rupiah) dan realisasi sebesar Rp. 894.373.601,- (delapan ratus sembilan puluh empat juta tiga ratus tujuh puluh tiga ribu enam ratus satu rupiah) atau setara dengan 54,84%, berikut realisasi pekerjaan s/d triwulan II penyelenggaraan program drainase :

a. Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota

3) Program Pengembangan Jasa Konstruksi;

Pada semester I atau triwulan II tahun 2025 telah diselenggarakan pelatihan tenaga trampil konstruksi dengan peserta dari pihak penyedia jasa dan perwakilan OPD Kabupaten Kebumen.

4) Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum;

Dalam pelaksanaannya Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum berfokus pada Pembangunan, Pengembangan dan Operasi SPAM dengan pagu program Rp. 807.443.000,- (delapan ratus tujuh juta empat ratus empat puluh tiga ribu rupiah) dan realiasi Rp. 49.139.900,- (empat puluh Sembilan juta serratus tiga puluh Sembilan ribu Sembilan ratus rupiah) setara dengan 6,09%. Dimana sampai dengan triwulan II sudah melaksanakan kegiatan sebagai berikut :

a. Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota Dimana terdapat sub kegiatan sebagai berikut ;

1. Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawsan Perdesaaan

Pembangunan SPAM Desa Kalijering Kecamatan Padureso, Penyusunan DED SPAM regional.

2. Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan

Peningkatan SPAM Desa Jogomulyo Kecamatan Buayan.

5) Program Penataan Bangunan Gedung;

Dalam pelaksanaannya Program Penataan Bangunan Gedung berfokus pada Pembangunan, Pemeliharaan, Pembinaan, Bantuan Teknis dan Penerbitan Persetujuan PBG. Pagu program Rp.

19.338.619.670,- (Sembilan Belas Milyar Tiga Ratus Tiga Puluh Delapan Juta Enam Ratus Sembilan Ribu Enam Ratus Tujuh Puluh Rupiah) dan realiasi Rp. 128.089.375,- (Seratus Dua Puluh Delapan Juta Delapan Puluh Sembilan Ribu Tiga Ratus Tujuh Puluh Lima Rupiah) setara dengan 0,66%. Dimana sampai dengan triwulan II sudah melaksanakan kegiatan sebagai berikut;

a. Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung

1. Penyelenggaraan Penerbitan Izin Mendirikan Bangunan Gedung (IMB), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), peran Tenaga Ahli Bangunan Gedung (TABG), Pendataan Bangunan Gedung, serta Implementasi SIMBG.

Pada Triwulan II tahun 2025 sub kegiatan tersebut telah memberikan izin mendirikan sebanyak 250 izin.

2. Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Bangunan Gedung Negara Daerah Kabupaten/Kota
3. Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan, dan Pemanfaatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota akan melaksanakan kontrak Pembangunan pendopo kabumian tahap 2.

4. Bantuan Teknis Pembangunan Bangunan Gedung Negara Daerah Kabupaten/Kota

Kegiatan tersebut sedang menunggu terbitnya perbup terkait bangunan gedung

5. Pemeliharaan dan Perawatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota

Pada triwulan II telah melaksanakan kegiatan pemeliharaan Gedung Kecamatan Rowokele, Gedung Kecamatan Kebumen, dan Gedung Kecamatan Mirit.

6) Program Penataan Bangunan dan Lingkungannya;

Dalam pelaksanaannya Program Penataan Bangunan Gedung dan Lingkungannya berfokus pada Perencanaan SPAM dan Gedung pada Bidang Cipta Karya serta hibah bantuan Semen. Pagu program Rp. 712.485.000,- (Tujuh Ratus Dua Belas Juta Empat Ratus Delapan Puluh Lima Ribu Rupiah) dan realiasi Rp. 36.023.906,- (Tiga Puluh Enam Tujua Dua Puluh Tiga Ribu Sembilan Ratus Enam Rupiah) setara dengan 5,06%. Dimana sampai dengan triwulan II sudah melaksanakan kegiatan sebagai berikut :

a. Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota

1. Pengawasan Penataan Bangunan dan Lingkungan

Pada triwulan II telah melaksanakan hibah semen pada Desa Kenoyojayan Kecamatan Ambal dan Desa Tugu Kecamatan Buayan Berjumlah 400 zak semen. Untuk selanjutnya sedang menunggu SK bupati terkait hibah semen.

2. Penyusunan Rencana dan Teknis Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota
Penyusunan DED akan dilaksanakan pada Triwulan IV.

7) Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA);

Dalam pelaksanaannya Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA) berfokus pada kegiatan Irigasi dan Embung. Pagu program Rp. 2.661.504.100,- (Dua Milyar Enam Ratus Enam Puluh Satu Juta Lima Ratus Empat Ribu Seratus Rupiah) dan realiasi Rp. 1.244.256.326,- (Satu Milyar Dua Ratus Empat Puluh Empat Juta Dua Ratus Lima Puluh Enam Ribu Tiga Ratus Dua Puluh Enam Rupiah) setara dengan 46,75%. Dimana sampai dengan triwulan II sudah melaksanakan kegiatan sebagai berikut :

a. Kegiatan Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota

1. Operasi dan Pemeliharaan Embung dan Penampung Air Lainnya

Pada triwulan II tahun 2025 telah dilaksanakan kegiatan OP embung dan penampungan air lainnya pada Pemeliharaan Embung Pandansari

2. Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa.

Kegiatan penyusunan embung dilaksanakan pada triwulan IV.

b. Kegiatan Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya dibawah 1000 Ha dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota

1. Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan

Kegiatan Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan DI. Kebakalan I telah berkontrak pada triwulan II selesai pada triwulan IV.

2. Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan

Pada triwulan II tahun 2025 telah dilaksanakan Pemeliharaan Jaringan Pemeliharaan D.I. Krumpit Desa Wagirpandan Kecamatan Rowokele, Pemeliharaan Irigasi D.I. Purwosari Desa Krandegan Kecamatan Puring, Pemeliharaan Irigasi D.I. Krandegan Desa Krandegan Kecamatan Puring, Pemeliharaan Irigasi D.I. Kaliketek Kelurahan Jatiluhur Kecamatan Karangayar, Pemeliharaan Sayap Bendung Kaliketek Kelurahan Jatiluhur Kecamatan Karangayar, Pemeliharaan Saluran D.I. Jlegong Desa Kretek Kecamatan Rowokele, Pemeliharaan Saluran D.I. Plikon Desa Candi Kecamatan Karangayar, Pemeliharaan Saluran D.I. Rembang Desa Jatiluhur Kecamatan Rowokele, Pemeliharaan Saluran D.I Semampir (NORMALISASI) Desa Jatiroto kecamatan Buayan, Pemeliharaan Irigasi D.I.Kaliketek Kelurahan Jatiluhur Kecamatan Karangayar.

8) Program Penyelenggaraan Penataan Ruang;

Dalam pelaksanaannya Program Penyelenggaraan Penataan Ruang berfokus pada kegiatan Penyusunan, Pengendalian, Pemanfaatan RDTR dan RTRW. Pagu program Rp. 666.392.000,- (Enam Ratus Enam Puluh Enam Juta Tiga Ratus Sembilan Puluh Dua Ribu Rupiah) dan realiasi Rp. 103.736.612,- (Seratus Tiga Juta Tujuh Ratus Tiga Puluh Enam Ribu Enam Ratus Dua Belas Rupiah) setara dengan 15,57%. Dimana sampai dengan triwulan II sudah melaksanakan kegiatan sebagai berikut :

- a. Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota
 1. Pelaksanaan Persetujuan Substansi RDTR Kabupaten/Kota
 Pada triwulan II tahun 2025 telah dilaksanakan kegiatan sosialisasi, rapat-rapat dokumen persetujuan substansi RDTR.
 - b. Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota.
 1. Penyusunan RDTR Kabupaten/Kota
 Pada tahun 2025 rencana penyusunan RDTR perkotaan gombong-karangnyar. Sampai dengan triwulan II masih dilakukan sosialisasi, pemetaan terkait RDTR tersebut.
 2. Peningkatan Peran Masyarakat dalam Penataan Ruang
 Kegiatan peningkatan peran berupa sosialisasi-sosialisasi untuk mendukung progress penataan ruang sesuai ketentuannya.
 - c. Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota
 1. Pelaksanaan Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang
 Pada triwulan II tahun 2025 telah dilakukan pengumpulan bahan penyusunan dokumen SPPR (Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang).
 2. Sistem Informasi Penataan Ruang
 Pada triwulan II tahun 2025 telah dilakukan updating data untuk website tata ruang kabupaten kebumen.
 - d. Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota
 1. Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang
 Sub kegiatan tersebut berfokus pada sosialisasi investasi terkait tata ruang kabupaten kebumen
- 9) Program Penyelesaian Sengketa Lahan
 Dalam pelaksanaannya Program Penyelesaian Sengketa Lahan berfokus pada kegiatan sosialisasi tentang lahan Pemerintah Daerah. Pagu program Rp. 20.830.000,- (Dua Puluh Juta Delapan Ratus Tiga Puluh Ribu Rupiah) dan realiasi Rp. 4.090.100,- (Empat Juta Sembilan Puluh Ribu Seratus Rupiah) setara dengan 19,64%. Dimana sampai dengan triwulan II sudah melaksanakan kegiatan sebagai berikut :
- a. Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota
 1. Inventarisasi Sengketa, Konflik, dan Perkara Pertanahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
 Pada triwulan II tahun 2025 telah mendapatkan aduan sebanyak 7 aduan dan baru terselesaikan sebanyak 2 aduan.
- 10) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
 Dalam pelaksanaannya Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota berfokus pada kegiatan perencanaan, evaluasi, gaji, pemeliharaan pengamanan aset, pengadaan barang milik daerah dsb. Pagu program Rp. 22.868.899.000,- (Dua Puluh Dua Miliar Delapan Ratus Enam Puluh Delapan Juta Delapan Ratus Sembilan Puluh Sembilan Ribu Rupiah) dan realiasi Rp.

10.316.858.486,- (Sepuluh Milyar Tiga Ratus Enam Belas Ribu Delapan Ratus Lima Puluh Delapan Juta Empat Ratus Delapan Puluh Enam Rupiah) setara dengan 45,11%. Dimana sampai dengan triwulan II sudah melaksanakan kegiatan sebagai berikut :

- a. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
Pada triwulan II tahun 2025 kegiatan tersebut sudah dilaksanakan perencanaan dan evaluasi kinerja sebanyak 16 Dokumen.
- b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
Pada triwulan II tahun 2025 sudah dilaksanakan pembayaran gaji ASN, THR dan Gaji ke 13.
- c. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
Pada triwulan II tahun 2025 sudah dilaksanakan pelaporan barang milik daerah semester I.
- d. Administrasi Umum Perangkat Daerah
Pada triwulan II tahun 2025 kegiatan rutin seperti rapat-rapat, cetak dan penggandaan, penataan arsip dan konsultasi luar daerah sudah tercukupi.
- e. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
Pada triwulan II tahun 2025 kegiatan pengadaan telah terealisasi sebanyak 39 unit.
- f. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Sub kegiatan tersebut bersifat persediaan seperti pembelian Listrik, surat menyurat dan kebersihan kantor
- g. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Sub kegiatan tersebut bersifat persediaan seperti pemeliharaan kendaraan, pajak kendaraan, pemeliharaan mebel, pemeliharaan alat kerja lainnya dan pemeliharaan Gedung kantor yang bersifat umum.

Pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kebumen tidak terlepas dari faktor pendorong maupun faktor penghambatnya, antara lain :

1. Faktor-faktor pendorong terpenuhinya target kinerja program dan kegiatan adalah adanya perencanaan yang matang dalam penyusunan rencana kerja untuk tahun bersangkutan sehingga target kinerja dapat tercapai, serta adanya koordinasi dan pemahaman tugas sebagai bentuk penyeimbangan pelaksanaan program dan kegiatan serta relevansi antara program dan pagu anggaran yang tersedia. Terpenuhinya target kinerja program dan kegiatan juga tidak terlepas dari dukungan yang diberikan oleh pimpinan Organisasi Perangkat Daerah serta kerja sama seluruh jajaran Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
2. Faktor-faktor penyebab belum tercapainya target kinerja program kegiatan antara lain terkendala proses administrasi pengadaan barang jasa.

Realisasi program, kegiatan dan sub kegiatan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2025 sampai dengan triwulan II dapat dilihat pada tabel 2.1

Tabel 2. 1 T-C.29 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Periode Pelaksanaan Triwulan II Tahun 2025

Nama Perangkat Daerah : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

No	Sasaran	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan(output)	Target Renstra SKPD pada Tahun 2026 (Akhir		Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD		Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD		Tingkat Capaian		Unit Perangkat Daerah Penanggungjawab
				5		6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 13/5 x		
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2	3	4																			15		
		URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN																						
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN			758.228.842.000		117.567.365.703		97.047.314.187		970.892.955		15.180.360.955						16.151.253.910		133.718.619.613			
		Meningkatnya kualitas Infrastruktur Daerah																						
		PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Persentase Infrastruktur Sumber Daya Air Kewenangan Kabupaten dalam Kondisi Baik	87,5	124.842.323.000	78,75	7.282.890.924	85	2.661.504.100	78,75	517.482.950	78,75	726.773.376					78,75	1.244.256.326	78,75	8.527.147.250	90	6,83	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
		Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah bangunan konservasi SDA yang terbangun dan terpelihara	6	4.625.000.000	6	209.647.287	6	144.836.100		8.683.050	6	70.686.600					6	79.369.650	6	289.016.937	100	6,25	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
		Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya dibawah 1000 Ha dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah areal irigasi yang terlayani	7	120.217.323.000	5	7.073.243.637	7	2.516.668.000		508.799.900	4	656.086.776					4	1.164.886.676	4	8.238.130.313	57,14	6,85	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
		PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Persentase Pelayanan Air Bersih Perpipaan	25	45.435.734.000	24,76	10.601.090.314	23,75	807.443.000	24,76	9.896.100	24,76	39.243.800					24,76	49.139.900	24,76	10.650.230.214	99,04	23,44	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
		Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah sambungan rumah yang terlayani	81.192	45.435.734.000	89.210	10.601.090.314	76.332	807.443.000	89.210	9.896.100	89.210	39.243.800					89.210	49.139.900	89.210	10.650.230.214	109,9	23,44	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
		PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	Persentase Saluran Drainase dalam Kondisi Baik	20,04	31.038.000.000	16,21	1.653.867.333	19,98	1.630.773.417	16,23	330.215.701	16,23	564.157.900					16,23	894.373.601	16,23	2.548.240.934	80,99	8,21	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
		Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah saluran drainase yang dipelihara/direhabilitasi/ dibangun	69	31.038.000.000	11	1.653.867.333	13	1.630.773.417	2	330.215.701	5	564.157.900					5	894.373.601	5	2.548.240.934	7,25	8,21	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
		PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	Persentase Bangunan Gedung Pemerintah dalam Kondisi Baik	83,84	12.906.377.000	82,49	13.562.355.313	83,16	19.338.619.670	82,49	24.327.300	82,49	103.762.075					82,49	128.089.375	82,49	13.690.444.688	98,39	106,1	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
		Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	Prosentase bangunan gedung pemerintah dalam kondisi baik	83,84	12.906.377.000	82,49	13.562.355.313	83,16	19.338.619.670	82,49	24.327.300	82,49	103.762.075					82,49	128.089.375	82,49	13.690.444.688	98,39	106,08	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
		PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA	Persentase Bangunan dan Lingkungan yang Tertangani	15	5.465.596.000	15	2.615.062.979	15	712.485.000	15	10.278.306	15	25.745.600					15	36.023.906	15	2.651.086.885	100	48,5	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
		Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen perencanaan yang tersusun	22	5.465.596.000	14	2.615.062.979	6	712.485.000	2	10.278.306	4	25.745.600					4	36.023.906	4	2.651.086.885	18,18	48,5	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

No	Sasaran	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan(output)	Target Renstra SKPD pada Tahun 2026 (Akhir	Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD	Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD	Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran	Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD	Tingkat Capaian	Unit Perangkat Daerah Penanggungjawab						
							I		II		III		IV											
							8	9	10	11	12	13	14 = 13/5 x	15										
1	2	3	4	5	6	7	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	15			
		PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Persentase Jalan Kewenangan Kabupaten dalam Kondisi Mantap	85,18	531.008.306.000	73,48	81.326.977.366	82,23	71.137.053.000	73,48	45.309.918	73,48	13.633.970.172					73,48	13.679.280.090	73,48	95.006.257.456	86,26	17,89	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota		Jumlah panjang jalan yang tertangani	130	531.008.306.000	42,19	81.326.977.366	24,84	71.137.053.000		45.309.918		13.633.970.172						13.679.280.090		95.006.257.456	0	17,89	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
		PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	Persentase Penyedia Jasa Konstruksi yang Telah Dibina dan Nilainya Baik	64,92	2.455.823.000	55,08	95.532.360	60	93.044.000	55,08	3.529.900	55,08	12.824.200					55,08	16.354.100	55,08	111.886.460	84,84	4,56	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi		Jumlah kegiatan penyelenggaraan pelatihan tenaga terampil konstruksi	10	1.423.456.000	1	47.416.750	2	43.830.000		2.224.900	1	12.159.200					1	14.384.100	1	61.800.850	10	4,34	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah penyelenggaraan sistem informasi jasa konstruksi cakupan daerah kabupaten/kota	310	781.513.000	1	48.115.610	62	49.214.000		1.305.000		665.000						1.970.000		50.085.610	0	6,41	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	Penerbitan Izin Usaha Jasa Konstruksi Nasional (Non Kecil dan Kecil)		Jumlah penerbitan rekomendasi Izin Usaha Jasa Konstruksi Nasional (Non Kecil dan Kecil)	650	250.854.000	0		140										0		0		0	0	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
		PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	Persentase Kesesuaian Lahan dengan Pola Ruang RTRW	91,55	5.076.683.000	91,35	429.589.114	91,45	666.392.000	91,35	29.852.780	91,35	73.883.832					91,35	103.736.612	91,35	533.325.726	99,78	10,51	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (KTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota		Jumlah dokumen rekomendasi RRRW dan RRTR Kabupaten/Kota	10	3.099.683.000	2	243.680.104	2	199.239.000		16.699.780		23.224.456						39.924.236		283.604.340	0	9,15	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah kegiatan koordinasi penyusunan RTRW dan RRTR yang dilaksanakan	27	727.400.000	15	58.238.442	27	369.992.000	2	5.416.500	6	15.710.876					6	21.127.376	6	79.365.818	22,22	10,91	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah dokumen pemanfaatan ruang yang tersusun	150	977.000.000	361	96.369.448	140	77.839.000		5.284.800		32.414.100						37.698.900		134.068.348	0	13,72	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah Kegiatan koordinasi pengendalian pemanfaatan ruang daerah kabupaten/kota	60	272.600.000	13	31.301.120	12	19.322.000	3	2.451.700	6	2.534.400					6	4.986.100	6	36.287.220	10	13,31	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

[illegible]

7/8/25, 9:47 AM

Evaluasi Renja

No	Sasaran	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan(output)	Target Renstra SKPD pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra SKPD)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD sampai dengan Renja SKPD Tahun Lalu 2024		Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi				Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD yang dievaluasi	Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d tahun 2025 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja SKPD Tahun 2025)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD s/d tahun 2025 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggungjawab
												I	II	III	IV	K	Rp	K	Rp					
1.	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 13/5 x 100%		15
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
Produk Kinerja																								
Faktor pendorong keberhasilan kinerja:				Ketersediaan Anggaran yang memadai untuk tercapainya target program, kegiatan dan target RKU (Indikator Kinerja Utama) pemerintah daerah																				
Faktor penghambat pencapaian kinerja:				Adanya Dapen Nomor 1 tahun 2025 mengakibatkan adanya relokasi anggaran pada tahun berjalan sehingga target dari masing-masing program ada yang dibarengkan dan belum sesuai dengan rencana																				
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya:				Sinkronisasi Penencanaan, Penganggaran dengan target RPJMD dan kemampuan Keuangan Daerah																				
Tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja Perangkat Daerah berikutnya:																								



Sumber Data : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, 2025

BAB III

RANCANGAN PERUBAHAN RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Perkembangan keadaan dan situasi terhadap perubahan arah kebijakan penganggaran serta mempertimbangkan kondisi realisasi pendapatan Tahun 2025 berjalan pada Pemerintah Kabupaten Kebumen diperlukan perubahan terhadap Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2025, yakni terkait pemenuhan Infrastruktur jalan, jembatan, drainase, hibah semen, Pembangunan gedung dan SPAM, hal tersebut dilakukan untuk mendukung target Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) dan untuk mendukung Program Kepala Daerah Terpilih. Karenanya dalam rangka menyikapi hal tersebut Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kebumen juga mengalami perubahan dalam akun belanja yang disampaikan dalam dokumen Rancangan Perubahan Rencana Kerja Tahun 2025.

Perubahan Anggaran Tahun 2025 pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kebumen terjadi pada 8 (delapan) program, 15 (lima belas) kegiatan dan 26 (dua puluh enam) sub kegiatan, yakni :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
 - A. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 - a. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
Anggaran Rp. 20.586.605.000,- (Dua Puluh Milyar Lima Ratus Delapan Puluh Enam Juta Enam Ratus Lima Ribu Rupiah) perlu dilakukan penyesuaian pada rekening belanja gaji pokok dan tunjangan PNS sebesar Rp. 1.338.389.000,- (Satu Milyar Tiga Ratus Tiga Puluh Delapan Juta Tiga Ratus Delapan Puluh Sembilan Ribu Rupiah). Sehingga pagu sub kegiatan tersebut menjadi Rp. 19.248.216.000,- (Sembilan Belas Milyar Dua Ratus Empat Puluh Delapan Juta Dua Ratus Enam Belas Ribu Rupiah).
 - B. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 - a. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
Anggaran Rp. 171.721.000,- (Seratus Tujuh Puluh Satu Juta Tujuh Ratus Dua Puluh Satu Ribu Rupiah) dilakukan penyesuaian rincian belanja pada rekening belanja modal peralatan komputer. Sehingga pagu perubahan menjadi Rp. 171.114.000,- (Seratus Tujuh Puluh Satu Juta Seratus Empat Belas Ribu Rupiah).

C. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

- a. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
Penyesuaian Anggaran untuk belanja tenaga keamanan dan kebersihan sebesar Rp. 3.425.000 (Tiga Juta Empat Ratus Dua Puluh Lima Ribu Rupiah). Sehingga pagu sub kegiatan tersebut menjadi Rp. 170.558.000,- (Seratus Tujuh Puluh Juta Lima Ratus Lima Puluh Delapan Ribu Rupiah).

D. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

- a. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
Penyesuaian Anggaran pada rekening pemeliharaan dan rekening belanja bahan bakar. Penyesuaian sebesar Rp. 6.108.000,- (Enam Juta Seratus Delapan Ribu Rupiah), dimana angka tersebut dipindahkan ke sub kegiatan pelayanan umum kantor menjadi Rp. 443.892.000,- (Empat Ratus Empat Puluh Tiga Juta Delapan Ratus Sembilan Puluh Dua Ribu Rupiah).

2. Program Penyelenggaraan Jalan

A. Kegiatan Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota

- a. Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan

Pagu sub kegiatan murni sebesar Rp. 500.000.000,- (Lima Ratus Juta Rupiah), untuk mendukung program kepala daerah terpilih dan penyesuaian target Renstra/RPJMD dilakukan penyesuaian anggaran sebesar Rp. 1.039.053.000,- (Satu Milyar Tiga Puluh Sembilan Juta Lima Puluh Tiga Ribu Rupiah). Tambahan tersebut untuk penyusunan dokumen sebanyak 14 dokumen perencanaan jalan dan jembatan. Sehingga pagu anggaran perubahan sebesar Rp. 1.539.053.000 (Satu Milyar Lima Ratus Tiga Puluh Sembilan Juta Lima Puluh Tiga Ribu Rupiah).

- b. Pemeliharaan Berkala Jalan

Pagu sub kegiatan murni sebesar Rp. 31.629.801.000,- (Tiga Puluh Satu Milyar Enam Ratus Dua Puluh Sembilan Juta Delapan Ratus Satu Ribu Rupiah), untuk mendukung program kepala daerah terpilih dan penyesuaian target Renstra/RPJMD dilakukan penyesuaian anggaran sebesar Rp. 81.711.808.000,- (Delapan Puluh Satu Milyar Tujuh Ratus Sebelas Juta

Delapan Ratus Delapan Ribu Rupiah). Tambahan tersebut untuk pemeliharaan berkala sepanjang 25,5 Km yang tersebar diseluruh kecamatan sesuai dengan wewenangannya. Sehingga pagu anggaran perubahan sebesar Rp. 113.341.609.000 (Seratus Tiga Belas Milyar Tiga Ratus Empat Puluh Satu Juta Enam Ratus Sembilan Ribu Rupiah).

c. Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Jalan Kewenangan Kabupaten/Kota dan Desa

Pagu sub kegiatan murni sebesar Rp. 597.560.000,- (Lima Ratus Sembilan Puluh Tujuh Juta Lima Ratus Enam Puluh Ribu Rupiah), dilakukan penyesuaian anggaran sebesar Rp. 24.441.000,- (Dua Puluh Empat Juta Empat Ratus Empat Puluh Satu Ribu Rupiah). Sehingga pagu anggaran perubahan sebesar Rp. 622.001.000,- (Enam Ratus Dua Puluh Dua Juta Seribu Rupiah).

d. Pemeliharaan Berkala Jembatan

Pagu sub kegiatan murni sebesar Rp. 1.400.000.000,- (Satu Milyar Empat Ratus Juta), dilakukan penyesuaian anggaran sebesar Rp. 1.350.000.000,- (Satu Milyar Tiga Ratus Lima Puluh Juta Rupiah). Sehingga pagu anggaran perubahan sebesar Rp. 2.750.000.000,- (Dua Milyar Tujuh Ratus Lima Puluh Juta Rupiah).

e. Pemeliharaan Rutin Jalan

Pagu sub kegiatan murni sebesar Rp. 13.328.158.000,- (Tiga Belas Milyar Tiga Ratus Dua Puluh Delapan Juta Seratus Lima Puluh Delapan Ribu Rupiah), dilakukan penyesuaian anggaran sebesar Rp. 4.972.976.000,- (Empat Milyar Sembilan Ratus Tujuh Puluh Dua Juta Sembilan Ratus Tujuh Puluh Enam Ribu Rupiah). Sehingga pagu anggaran perubahan sebesar Rp. 18.301.134.000,- (Delapan Belas Milyar Tiga Ratus Satu Juta Seratus Tiga Puluh Empat Ribu Rupiah).

3. Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)

A. Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota

a. Operasi dan Pemeliharaan Embung dan Penampung Air Lainnya

Pagu sub kegiatan murni sebesar Rp. 101.030.000,- (Seratus Satu Juta Tiga Puluh Ribu Rupiah), dilakukan penyesuaian anggaran sebesar Rp. 16.063.750,- (Enam Belas Juta Enam Puluh Tiga Ribu Tujuh Ratus Lima Puluh Rupiah). Sehingga pagu anggaran perubahan sebesar Rp. 84.966.250,- (Delapan Puluh Empat

- Juta Sembilan Ratus Enam Puluh Enam Ribu Dua Ratus Lima Puluh Rupiah).
- b. Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Bendungan, Embung, dan Bangunan Penampung Air Lainnya
Pagu sub kegiatan murni sebesar Rp. 53.080.000,- (Lima Puluh Tiga Juta Delapan Puluh Ribu Rupiah), dilakukan penyesuaian anggaran sebesar Rp. 91.329.850,- (Sembilan Puluh Satu Juta Tiga Ratus Dua Puluh Sembilan Ribu Delapan Ratus Lima Puluh Rupiah). Sehingga pagu anggaran perubahan sebesar Rp. 144.409.850,- (Seratus Empat Puluh Empat Juta Empat Ratus Sembilan Ribu Delapan Ratus Lima Puluh Rupiah). Penambahan tersebut untuk Penyusunan Dokumen Kajian Teknis Embung Giritirto Desa Giritirto Kecamatan Karanggayam.
- B. Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di Bawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota
- a. Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan
Pagu sub kegiatan murni sebesar Rp. 13.952.485.000,- (Tiga Belas Milyar Sembilan Ratus Lima Puluh Dua Juta Empat Ratus Delapan Puluh Lima Ribu Rupiah) bersumber pada Dana Alokasi Khusus (DAK), dilakukan penyesuaian anggaran karena adanya Inpres nomor 1 Presiden Tahun 2025 tentang efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 sehingga mengakibatkan DAK tidak turun. Sehingga penyesuaian anggaran perubahan menjadi Rp. 665.253.500,- (Enam Ratus Enam Puluh Lima Juta Dua Ratus Lima Puluh Tiga Ribu Lima Ratus Rupiah).
 - b. Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan
Pagu sub kegiatan murni sebesar Rp. 900.000.000,- (Sembilan Ratus Ribu Rupiah), dilakukan penyesuaian anggaran sebesar Rp. 20.245.000,- (Dua Puluh Juta Dua Ratus Empat Puluh Lima Ribu Rupiah). Sehingga pagu anggaran perubahan sebesar Rp. 879.755.000,- (Delapan Ratus Tujuh Puluh Sembilan Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Lima Ribu Rupiah).
 - c. Pengelolaan dan Pengawasan Alokasi Air Irigasi
Pagu sub kegiatan murni sebesar Rp. 500.000.000,- (Lima Ratus Ribu Rupiah), dilakukan penyesuaian anggaran sebesar Rp.

- 17.098.000,- (Tujuh Belas Juta Sembilan Puluh Delapan Ribu Rupiah). Sehingga pagu anggaran perubahan sebesar Rp. 482.902.000,- (Empat Ratus Delapan Puluh Dua Juta Sembilan Ratus Dua Ribu Rupiah).
- d. Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa
- Pagu sub kegiatan murni sebesar Rp. 286.411.000,- (Dua Ratus Delapan Puluh Enam Juta Empat Ratus Sebelas Ribu Rupiah), dilakukan penambahan anggaran sebesar Rp. 276.744.000,- (Dua Ratus Tujuh Puluh Enam Juta Tujuh Ratus Empat Puluh Empat Ribu Rupiah). Sehingga pagu anggaran perubahan sebesar Rp. 563.155.000,- (Lima Ratus Enam Puluh Tiga Juta Seratus Lima Puluh Lima Ribu Rupiah)
4. Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase
- A. Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota
- a. Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase Lingkungan
- Pagu sub kegiatan murni sebesar Rp. 1.470.064.000,- (Satu Milyar Empat Ratus Tujuh Puluh Juta Enam Puluh Empat Ribu Rupiah), dilakukan penambahan anggaran sebesar Rp. 5.144.935.400,- (Lima Milyar Seratus Empat Puluh Empat Juta Sembilan Ratus Tiga Puluh Lima Ribu Empat Ratus Rupiah). Sehingga pagu anggaran perubahan sebesar Rp. 6.614.999.400,- (Enam Milyar Enam Ratus Empat Belas Juta Sembilan Ratus Sembilan Puluh Sembilan Ribu Empat Ratus Rupiah). Penambahan tersebut untuk pemeliharaan drainase alun-alun Pancasila kebumen dan pemeliharaan drainase jalan Soekarno hatta dan jalan Sugiono kebumen.
- b. Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Lingkungan
- Pagu sub kegiatan murni sebesar Rp. 198.981.000,- (Seratus Sembilan Puluh Delapan Juta Sembilan Ratus Delapan Puluh Satu Ribu Rupiah), dilakukan penambahan anggaran sebesar Rp. 77.835.000,- (Tujuh Puluh Tujuh Juta Delapan Ratus Tiga Puluh Lima Ribu Rupiah). Sehingga pagu anggaran perubahan sebesar Rp. 276.816.000,- (Dua Ratus Tujuh Puluh Enam Juta Delapan Ratus Enam Belas Ribu Rupiah). Penambahan tersebut untuk perencanaan tahun 2026.

5. Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum
 - A. Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota
 - a. Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan
 Pagu sub kegiatan murni sebesar Rp. 751.800.000,- (Tujuh Ratus Lima Puluh Satu Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah), dilakukan penambahan anggaran sebesar Rp. 3.233.853.000,- (Tiga Milyar Dua Ratus Tiga Puluh Tiga Juta Delapan Ratus Lima Puluh Tiga Ribu Rupiah). Sehingga pagu anggaran perubahan sebesar Rp. 3.985.653.000,- (Tiga Milyar Sembilan Ratus Delapan Puluh Lima Juta Enam Ratus Lima Puluh Tiga Ribu Rupiah). Penambahan tersebut untuk pekerjaan 16 lokasi prioritas.
6. Program Penataan Bangunan Gedung
 - A. Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung
 - a. Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestarian dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota
 Pagu sub kegiatan murni sebesar Rp. 18.702.553.987,- (Delapan Belas Milyar Tujuh Ratus Dua Juta Lima Ratus Lima Puluh Tiga Ribu Sembilan Ratus Delapan Puluh Tujuh Rupiah), dilakukan pengurangan anggaran sebesar Rp. 6.600.000.987,- (Enam Milyar Enam Ratus Juta Sembilan Ratus Delapan Puluh Tujuh Rupiah). Sehingga pagu anggaran perubahan sebesar Rp. 12.102.553.000,- (Dua Belas Milyar Seratus Dua Juta Lima Ratus Lima Puluh Tiga Ribu Rupiah).
 - b. Bantuan Teknis Pembangunan Bangunan Gedung Negara untuk Kepentingan Strategis Kabupaten/Kota
 Pagu sub kegiatan murni sebesar Rp. 30.000.000,- (Tiga Puluh Juta Rupiah), dilakukan penambahan anggaran sebesar Rp. 71.857.300,- (Tujuh Puluh Satu Juta Delapan Ratus Lima Puluh Tujuh Ribu Tiga Ratus Rupiah). Sehingga pagu anggaran perubahan sebesar Rp. 101.857.300,- (Seratus Satu Juta Delapan Ratus Lima Puluh Tujuh Ribu Tiga Ratus Rupiah)
7. Program Penataan Bangunan dan Lingkungannya
 - A. Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota
 - a. Pengawasan Penataan Bangunan dan Lingkungan
 Pagu sub kegiatan murni sebesar Rp. 258.764.000,- (Dua Ratus Lima Puluh Delapan

Juta Tujuh Ratus Enam Puluh Empat Ribu Rupiah), dilakukan penambahan anggaran sebesar Rp. 943.598.900,- (Sembilan Ratus Empat Puluh Tiga Juta Lima Ratus Sembilan Puluh Delapan Ribu Sembilan Ratus Rupiah). Sehingga pagu anggaran perubahan sebesar Rp. 1.202.362.900,- (Satu Milyar Dua Ratus Dua Juta Tiga Ratus Enam Puluh Dua Ribu Sembilan Ratus Rupiah). Penambahan tersebut untuk pokok-pokok pikiran DPRD 2025.

8. Program Penyelenggaraan Penataan Ruang

A. Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota

- a. Pagu sub kegiatan murni sebesar Rp. 397.373.000,- (Tiga Ratus Sembilan Puluh Tujuh Juta Tiga Ratus Tujuh Puluh Tiga Ribu Rupiah), dilakukan pengurangan anggaran sebesar Rp. 47.331.000,- (Empat Puluh Tujuh Juta Tiga Ratus Tiga Puluh Satu Ribu Rupiah). Sehingga pagu anggaran perubahan sebesar Rp. 350.042.000,- (Tiga Ratus Lima Puluh Juta Empat Puluh Dua Ribu Rupiah). Pengurangan tersebut dimaksudkan untuk kegiatan-kegiatan lain pada program penataan ruang sebagai dukungan untuk pengendalian dan pemanfaatan ruang.

B. Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota

a. Pelaksanaan Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang

Pagu sub kegiatan murni sebesar Rp. 42.632.000,- (Empat Puluh Dua Juta Enam Ratus Tiga Puluh Dua Ribu Rupiah), dilakukan pengurangan anggaran sebesar Rp. 1.479.000,- (Satu Juta Empat Ratus Tujuh Puluh Sembilan Ribu Rupiah). Sehingga pagu anggaran perubahan sebesar Rp. 41.153.000,- (Empat Puluh Satu Juta Seratus Lima Puluh Tiga Ribu Rupiah). Pengurangan tersebut dimaksudkan untuk kegiatan-kegiatan lain pada program penataan ruang sebagai dukungan untuk pengendalian dan pemanfaatan ruang.

- b. Sistem Informasi dan Komunikasi Penataan Ruang
Pagu sub kegiatan murni sebesar Rp. 44.298.000,- (Empat Puluh Empat Juta Dua Ratus Sembilan Puluh Delapan Ribu Rupiah), dilakukan pengurangan anggaran sebesar Rp. 7.612.000,- (Tujuh Juta Enam Ratus Dua Belas Ribu Rupiah). Sehingga pagu anggaran perubahan sebesar Rp. 36.686.000,- (Tiga Puluh Enam Juta Enam Ratus Delapan Puluh Enam Ribu Rupiah). Pengurangan tersebut dimaksudkan untuk kegiatan-kegiatan lain pada program penataan ruang sebagai

dukungan untuk pengendalian dan pemanfaatan ruang.

C. Koordinasi dan Sinskronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota

a. Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang

Pagu sub kegiatan murni sebesar Rp. 26.500.000,- (Dua Puluh Enam Juta Lima Ratus Ribu Rupiah), dilakukan pengurangan anggaran sebesar Rp. 7.178.000,- (Tujuh Juta Seratus Tujuh Puluh Delapan Ribu Rupiah). Sehingga pagu anggaran perubahan sebesar Rp. 19.322.000,- (Sembilan Belas Juta Tiga Ratus Dua Puluh Dua Ribu Rupiah). Pengurangan tersebut dimaksudkan untuk kegiatan-kegiatan lain pada program penataan ruang sebagai dukungan untuk pengendalian dan pemanfaatan ruang.

9. Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan

A. Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Kabupaten/Kota

a. Mediasi Penyelesaian Kasus Pertanahan dalam 1 (satu) Dearah Kabupaten/Kota

Pagu sub kegiatan murni sebesar Rp. 30.000.000,- (Tiga Puluh Juta Rupiah), dilakukan pengurangan anggaran sebesar Rp. 9.170.000,- (Sembilan Juta Seratus Tujuh Puluh Ribu Rupiah). Sehingga pagu anggaran perubahan sebesar Rp. 20.830.000,- (Dua Puluh Juta Delapan Ratus Tiga Puluh Ribu Rupiah).

Secara lebih jelas Rancangan Perubahan Rencana Kerja dan Pendanaan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kebumen dapat dilihat pada tabel 3.1.

Tabel 3. 1 Rancangan Perubahan Rencana Kerja dan Pendanaan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kebumen Tahun 2025

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								
								Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Bertambah/ Berkurang (10-12)	Rasio (%)	Catatan Penting	
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025				
1	2					3	4	8	9	10	11	12	13			
						DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG				172.590.708.089	118.828.122.000	210.364.976.583	- 37.774.268.494	-21,89		
	1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				172.553.708.089	118.798.122.000	210.344.146.583	- 37.790.438.494	-21,90		
	1	03				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG				172.553.708.089	118.798.122.000	210.344.146.583	- 37.790.438.494	-21,90		
1	1	03	01			PROGRA M PENUNJ ANG URUSAN PEMERI NTAHAN DAERAH KABUPA TEN/KO TA	Cakupan Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintah an Daerah	100 %	100 %	22.010.416.089,00	22.918.860.000	21.530.060.000	480.356.089	2,18		

	1	0	0	2.		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang tersusun	17 Dokumen	31 Dokumen	214.500.000,00	164.388.000	164.388.000	50.112.000	23,36	
	1	0	0	2.	00	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah									
							Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5 Dokumen	14 Dokumen	100.000.000,00	65.745.000,00	65.745.000,00	34.255.000	34,26	
	1	0	0	2.	00	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah									
							Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	12 Laporan	17 Laporan	114.500.000,00	98.643.000,00	89.722.000,00	24.778.000	21,64	
	1	0	0	2.		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah bulan administrasi keuangan perangkat daerah	12 Bulan	12 Bulan	19.709.812.089,00	20.998.695.000,00	20.998.695.000,00	- 1.288.882.911	-6,54	
	1	0	0	2.	00	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN									

							Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	180 Orang/bulan	180 Orang/bulan	19.212.925.089,00	20.586.605.000,00	19.248.216.000,00	-35.290.911	-0,18	
	103	01	2.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD										
							Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	11 Dokumen	30 Dokumen	496.887.000,00	412.090.000,00	412.090.000,00	84.797.000	17,07	
	103	01	2.03		Administ rasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	12 Bulan	12 Bulan	161.960.000,00	109.928.000,00	109.928.000,00	52.032.000	32,13		
	103	01	2.03	0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD										
							Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik	1 Dokumen	1 Dokumen	161.960.000,00	109.928.000,00	102.039.000,00	59.921.000	37,00	

							Daerah SKPD								
	1	0	0	2.		Administ rasi Kepegaw aian Perangka t Daerah	Jumlah kegiatan administrasi kepegawaia n perangkat daerah	2 Paket	2 Paket	75.000.000,00	0,00	0,00	75.000.000	100,00	
	1	0	0	2.	00	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan									
							Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementa si Peraturan Perundang-Undangan	2 Orang	2 Orang	75.000.000,00	0,00	0,00	75.000.000	100,00	
	1	0	0	2.		Administ rasi Umum Perangka t Daerah	Jumlah bulan penyediaan administrasi umum perangkat daerah	12 Bulan	12 Bulan	421.444.000,00	300.048.000,00	300.048.000,00	121.396.000	28,80	
	1	0	0	2.	00	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor									

							Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12 Paket	12 Paket	40.100.000,00	40.100.000,00	37.315.000,00	2.785.000	6,95	
	1	0	0	2.	00	Penyediaan Bahan Logistik Kantor									
							Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket	12 Paket	75.000.000,00	66.780.000,00	66.780.000,00	8.220.000	10,96	
	1	0	0	2.	00	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan									
							Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	12 Paket	22.409.000,00	22.409.000,00	20.674.000,00	1.735.000	7,74	
	1	0	0	2.	00	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan									

							Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen	12 Dokumen	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	-	0,00	
	1	0	0	2.	00	Penyediaan Bahan/Material									
							Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	12 Paket	12 Paket	62.671.000,00	62.671.000,00	56.400.000,00	6.271.000	10,01	
	1	0	0	2.	00	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD									
							Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	12 Laporan	150.000.000,00	85.000.000,00	66.414.000,00	83.586.000	55,72	
	1	0	0	2.	00	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD									
							Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip	1 Dokumen	1 Dokumen	61.264.000,00	13.088.000,00	13.063.000,00	48.201.000	78,68	

							Dinamis pada SKPD								
	1	0	0	2.		Pengadaa n Barang Milik Daerah Penunjan g Urusan Pemerint ah Daerah	Jumlah unit Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	145 Unit	145 Unit	190.000.000,00	211.721.000,00	211.721.000,00	- 21.721.000		
	1	0	0	2.	00	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan								-11,43	
	3	3	1	07	02		Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	11 Unit	11 Unit	0,00	0,00	0,00	-	#DIV/ 0!	
	1	0	0	2.	00	Pengadaan Mebel									
	3	3	1	07	05		Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	125 Unit	27 Unit	40.000.000,00	40.000.000,00	40.000.000,00	-		
	1	0	0	2.	00	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya								0,00	
	3	3	1	07	06										

						Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	128 Unit	133 Unit	150.000.000,00	171.721.000,00	171.114.000,00	- 21.114.000		
	1	0	0	2.		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah bulan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan an daerah	12 Bulan	12 Bulan	467.700.000,00	469.133.000,00	469.133.000,00	- 1.433.000	-14,08
	1	0	0	2.	00	Penyediaan Jasa Surat Menyurat								
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	12 Laporan	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	-	0,00	
	1	0	0	2.	00	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik								
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi , Sumber Daya Air dan Listrik	12 Laporan	12 Laporan	300.000.000,00	300.000.000,00	300.000.000,00	-	0,00	

							yang Disediakan								
	1	0	0	2.	00	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor									
		3	1	08	04		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	165.700.000,00	167.133.000,00	170.558.000,00	- 4.858.000	-2,93	
	1	0	0	2.		Pemeliha raan Barang Milik Daerah Penunjan g Urusan Pemerint ahan Daerah	Jumlah bulan pemeliharaa n barang milik daerah penunjang urusan pemeintah daerah	12 Bulan	12 Bulan	770.000.000,00	664.947.000,00	664.947.000,00	105.053.000	13,64	
	1	0	0	2.	00	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan									
		3	1	09	02		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	25 Unit	25 Unit	500.000.000,00	450.000.000,00	443.892.000,00	56.108.000	11,22	

							yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinanny a									
	1	0	0	2.	00	Pemeliharaan Mebel										
		3	1	09	05											
							Jumlah Mebel yang Dipelihara	12 Unit	206 Unit	20.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00	-			
	1	0	0	2.	00	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya										
		3	1	09	06											
							Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	12 Unit	12 Unit	100.000.000,00	59.544.000,00	59.544.000,00	40.456.000			
														40,46		
	1	0	0	2.	00	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya										
		3	1	09	09											
							Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilita si	1 Unit	1 Unit	150.000.000,00	135.403.000,00	134.494.000,00	15.506.000			
														10,34		

2	1	03	02			PROGRA M PENGEL OLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Persentase Infrastuktur Sumber Daya Air Kewenanga n Kabupaten dalam Kondisi Baik	87,50 %	85 %	11.100.076.000,00	15.793.006.000,00	2.820.461.600,00	8.279.614.400		
	1	03	02	2.01		Pengelola an SDA dan Banguna n Pengama n Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupate n/Kota	Jumlah bangunan konservasi SDA yang terbangun dan terpelihara	6 %	6 %	2.004.174.000,00	154.110.000,00	154.110.000,00	1.850.064.000	74,59	
	1	03	02	2.01	0089	Operasi dan Pemeliharaan Embung dan Penampung Air Lainnya									
							Jumlah Embung dan Penampung	1 Unit	2 Unit	101.030.000,00	101.030.000,00	84.986.250,00	16.043.750	15,88	

							Air Lainnya yang Dioperasikan dan Dipelihara												
	1	0	0	2.	01	Penyusunan Pola dan Rencana Pengelolaan SDA WS Kewenangan Kabupaten/Kota													
		3	2	01	18		Jumlah Pola dan Rencana Pengelolaan SDA WS Kewenangan Kabupaten/Kota yang Disusun	3 Dokumen	3 Dokumen	150.064.000,00	0,00	0,00	150.064.000	100,00					
	1	0	0	2.	01	Pembangunan Embung dan Penampung Air Lainnya													
		3	2	01	21		Jumlah Embung dan Penampung Air Lainnya yang Dibangun	1 Unit	1 Unit	1.700.000.000,00	0,00	0,00	1.700.000.000	100,00					
	1	0	0	2.	01	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Bendungan, Embung, dan Bangunan Penampung Air Lainnya													
		3	2	01	28														

						Jumlah Dokumen Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Bendungan, Danau dan Bangunan Penampung Air Lainnya yang Disusun	2 Dokumen	2 Dokumen	53.080.000,00	53.080.000,00	144.409.850,00	- 91.329.850	- 172,06	
	1	03	02	2.02		Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di Bawah	Jumlah areal irigasi yang terlayani	7 Sub Kegiatan	4 Sub Kegiatan	9.095.902.000,00	15.638.896.000,00	15.638.896.000,00	- 6.542.994.000	-71,93

						1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupate n/Kota									
	1	0	0	2.	00	Pembangunan Jaringan Irigasi Permukaan									
		3	2	02	02		Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Dibangun	1 KM	0 KM	0,00	0,00	0,00	-	#DIV/ 0!	
	1	0	0	2.	00	Pembangunan Jaringan Irigasi Air Tanah									
		3	2	02	07		Panjang Jaringan Irigasi Air Tanah yang Dibangun	25 KM	0 KM	50.000.000,00	0,00	0,00	50.000.000	100,0 0	
	1	0	0	2.	00	Peningkatan Jaringan Irigasi Permukaan									
		3	2	02	08		Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Ditingkatka n	1 KM	0 KM	0,00	0,00	0,00	-	#DIV/ 0!	
	1	0	0	2.	00	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan									
		3	2	02	14										

							Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Direhabilitasi	10 KM	0,35 KM	7.229.491.000,00	13.952.485.000,00	665.253.500,00	6.564.237.500	90,80	
	1	0	0	2.	00	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan									
		3	2	02	21		Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Dioperasikan dan Dipelihara	17 KM	2 KM	900.000.000,00	900.000.000,00	879.755.000,00	20.245.000	2,25	
	1	0	0	2.	00	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Air Tanah									
		3	2	02	26		Panjang Jaringan Irigasi Air Tanah yang Dioperasikan dan Dipelihara	1 KM	0 KM	0,00	0,00	0,00	-	#DIV/0!	
	1	0	0	2.	00	Pengelolaan dan Pengawasan Alokasi Air Irigasi									
		3	2	02	32		Jumlah Daerah Irigasi yang Terkelola	50 DI	30 DI	500.000.000,00	500.000.000,00	482.902.000,00	17.098.000	3,42	

							dan Terawasi Alokasi Airnya								
	1	0 3	0 2	2. 02	00 35	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa									
							Jumlah Dokumen Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa yang Disusun	15 Dokume n	6 Dokume n	416.411.000,00	286.411.000,00	563.155.000,00	- 146.744.000	-35,24	
3	1	0 3	0 3			PROGRA M PENGEL OLAAN DAN PENGEM BANGAN SISTEM PENYEDI AAN AIR MINUM	Persentase Pelayanan Air Bersih Perpipaan	23,75 %	23,75 %	10.968.477.000,00	894.130.000,00	4.116.630.000,0 0	6.851.847.0 00	62,47	

	1	0	0	2.		Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sambungan Rumah yang terlayani	76332 SR	76332 SR	10.968.477.000,00	894.130.000,00	894.130.000,00	10.074.347.000		
														91,85	
	1	0	0	2.	00	Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)									
							Jumlah Masyarakat yang dibina dan diberdayakan dalam Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	100 Orang	92 Orang	96.896.000,00	42.330.000,00	30.977.000,00	65.919.000		
														68,03	
	1	0	0	2.	00	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)									

						Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yang disusun	4 Dokumen	4 Dokumen	0,00	0,00	0,00	-	#DIV/0!	
	1	0	0	2.	00	Peningkatan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan								
		3	3	01	26	Kapasitas Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan yang ditingkatkan	1 Liter/Detik	1 Liter/Detik	300.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00	200.000.000	66,67	
	1	0	0	2.	00	Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan								
		3	3	01	28	Kapasitas Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	10 Liter/Detik	12 Liter/Detik	10.571.581.000,00	751.800.000,00	3.985.653.000,00	6.585.928.000	62,30	

							yang dibangun								
	1	0	0	2.	00	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)									
		3	3	01	29		Jumlah Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yang Dioperasikan dan Dipelihara	1 Unit	1 Unit	0,00	0,00	0,00	-	#DIV/0!	
4	1	0	0			PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	Persentase Saluran Drainase dalam Kondisi Baik	20,04 %	19,98 %	1.669.045.000,00	1.669.045.000,00	6.891.815.400,00	- 5.222.770.400	- 312,92	
	1	0	0	2.		Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubu	Jumlah saluran drainase yang dipelihara/direhabilitasi /dibangun	16 Lokasi	10 Lokasi	1.669.045.000,00	1.669.045.000,00	1.669.045.000,00	-		0,00

						ng Langsun g dengan Sungai dalam Daerah Kabupate n/Kota									
	1	0	0	2.	00	Pembangunan Sistem Drainase Lingkungan									
		3	6	01	12		Panjang Saluran Drainase Lingkungan yang Dibangun	3 M	0 M	0,00	0,00	0,00	-	#DIV/ 0!	
	1	0	0	2.	00	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase Lingkungan									
		3	6	01	19		Panjang Sistem Drainase Lingkungan yang Beroperasi dan Terpelihara	300 Meter	650 Meter	1.470.064.000,00	1.470.064.000,00	6.614.999.400,0 0	- 5.144.935.4 00	- 349,9 8	
	1	0	0	2.	00	Peningkatan Sistem Drainase Lingkungan									
		3	6	01	21		Jumlah Sistem Drainase Lingkungan	1 Sistem Drainase Lingkun gan	0 Sistem Drainase Lingkun gan	0,00	0,00	0,00	-	#DIV/ 0!	

							yang Ditingkatka n								
	1	0 3	0 6	2. 01	00 23	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Lingkungan									
							Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Lingkungan yang disusun	3 Dokume n	5 Dokume n	198.981.000,00	198.981.000,00	276.816.000,00	- 77.835.000	-39,12	
5	1	0 3	0 8			PROGRA M PENATAA N BANGUN AN GEDUNG	Persentase Bangunan Gedung Pemerintah dalam Kondisi Baik	83,84 %	83,84 %	20.458.632.000,00	24.405.833.000,0 0	12.813.618.683, 00	7.645.013.3 17	37,37	
	1	0 3	0 8	2. 01		Penyelen ggaraan Banguna n Gedung di Wilayah Daerah Kabupate	Prosentase bangunan gedung pemerintah dalam kondisi baik	83,84 %	83,84 %	20.458.632.000,00	24.405.833.000,0 0	24.405.833.000, 00	- 3.947.201.0 00	-19,29	

						n/Kota, Pemberia n Izin Mendirik an Banguna n (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Banguna n Gedung									
	1	0	0	2.	00	Pemeliharaan, Perawatan, dan Pemeriksaan Berkala Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota									
							Jumlah Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Kabupaten/ Kota yang Dipelihara, Dirawat, dan Diperiksa Berkala	4 Bangun an Gedung	4 Bangun an Gedung	800.000.000,00	461.254.000,00	452.258.100,00	347.741.900		
														43,47	
	1	0	0	2.	00	Penyusunan Kebijakan terkait Penyelenggaraan Bangunan Gedung									
		3	8	01	19										

							Jumlah Dokumen Kebijakan terkait Penyelenggaraan Bangunan Gedung	125 Dokumen	125 Dokumen	0,00	0,00	0,00	-	#DIV/0!	
	1	0	0	2.	00	Bantuan Teknis Pembangunan Bangunan Gedung Negara untuk Kepentingan Strategis Kabupaten/Kota									
							Jumlah Bantuan Teknis Pembangunan Bangunan Gedung Negara untuk Kepentingan Strategis Kabupaten/Kota	11 Bantuan Teknis	100 Bantuan Teknis	30.000.000,00	30.000.000,00	101.857.300,00	- 71.857.300	- 239,52	
	1	0	0	2.	00	Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestarian dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota									
							Jumlah Dokumen Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestarian	5 Dokumen	5 Dokumen	19.450.000.000,00	23.750.000.000,00	12.102.553.000,00	7.347.447.000	37,78	

							dan Pembongkar an Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/ Kota								
	1	0	0	2.	00	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Bangunan Gedung									
	3	8	01		22		Jumlah Peserta yang mendapatka n Pembinaan dan pengawasan dalam Penyelengga raannya	125 Orang	125 Orang	40.000.000,00	38.625.000,00	37.475.683,00	2.524.317		
														6,31	
	1	0	0	2.	00	Penyelenggaraan Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG									
	3	8	01		23										

							Jumlah Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkar an Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG	500 Dokume n	500 Dokume n	138.632.000,00	125.954.000,00	119.474.600,00	19.157.400			13,82
--	--	--	--	--	--	--	---	--------------------	--------------------	----------------	----------------	----------------	------------	--	--	-------

6	1	0	0			PROGRA M PENATAA N BANGUN AN DAN LINGKUN GANNYA	Persentase Bangunan dan Lingkungan yang Tertangani	15,00 %	15,00 %	950.000.000,00	758.764.000,00	1.663.263.900,0 0	- 713.263.900	-75,08	
	1	0	0	2. 01		Penyelen ggaraan Penataan Banguna n dan Lingkung annya di Daerah Kabupate n/Kota	Jumlah dokumen perencanaa n yang tersusun	6 Dokume n	6 Dokume n	950.000.000,00	758.764.000,00	758.764.000,00	191.236.000	20,13	
	1	0	0	2. 01	00 07	Pengawasan Penataan Bangunan dan Lingkungan									
							Jumlah Dokumen Pengawasan Penataan Bangunan dan Lingkungan	50 Dokume n	10 Dokume n	450.000.000,00	258.764.000,00	1.202.362.900,0 0	- 752.362.900	- 167,1 9	
	1	0	0	2. 01	00 10	Penyusunan Rencana dan Teknis Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota									

							Jumlah Dokumen Rencana dan Teknis Penataan Bangunan dan Lingkungan yang Disusun di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/ Kota	6 Dokumen	6 Dokumen	500.000.000,00	500.000.000,00	460.901.000,00	39.099.000	7,82	
7	1	03	10			PROGRAM PENYELenggaraAN JALAN	Persentase Jalan Kewenangan Kabupaten dalam Kondisi Mantap	85,18 %	85,18 %	104.388.117.000,00	51.466.169.000,00	159.748.861.000,00	- 55.360.744.000	-53,03	
	1	03	10	2.01		Penyenggaraan Jalan Kabupaten/ Kota	Jumlah panjang jalan yang tertangani	24,84 Km	55 Km	104.388.117.000,00	51.466.169.000,00	51.466.169.000,00	52.921.948.000	50,70	
	1	03	10	2.01	0029	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan									

						Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan yang Disusun	15 Dokumen	22 Dokumen	1.000.000.000,00	500.000.000,00	1.539.053.000,00	- 539.053.000	-53,91	
	1	0	1	2.	00	Pembangunan Jalan								
		3	0	01	32		Panjang Jalan yang Dibangun	00 KM	00 KM	1.000.000.000,00	800.000.000,00	785.039.000,00	214.961.000	21,50
	1	0	1	2.	00	Pemeliharaan Berkala Jalan								
		3	0	01	34		Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Berkala	14,84 KM	35,5 KM	82.608.756.000,00	31.629.801.000,00	112.591.609.000,00	- 29.982.853.000	-36,30
	1	0	1	2.	00	Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Jalan Kewenangan Kabupaten/Kota dan Desa								
		3	0	01	36									

							Panjang Jalan Kewenangan Kabupaten/ Kota dan Desa yang Dipantau dan Dievaluasi Penyelenggaraannya	24,84 KM	55 KM	597.560.000,00	597.560.000,00	622.001.000,00	- 24.441.000		
	1	0	1	2.	00	Pelebaran Jalan Menuju Standar								-4,09	
		3	0	01	37		Panjang Jalan yang Dilebarkan Menuju Standar	0 KM	6 KM	0,00	0,00	20.000.000.000,00	- 20.000.000.000	#DIV/0!	
	1	0	1	2.	00	Pemeliharaan Rutin Jembatan									
		3	0	01	38		Jumlah Jembatan yang Dipelihara Secara Rutin	3 Jembatan	1 Jembatan	500.000.000,00	200.000.000,00	199.878.000,00	300.122.000	60,02	
	1	0	1	2.	00	Pembangunan Jembatan									
		3	0	01	40		Jumlah Jembatan	1 Jembatan	1 Jembatan	2.200.000.000,00	2.210.650.000,00	2.210.650.000,00	- 10.650.000	-0,48	

							yang Dibangun								
	1	0	1	2.	00	Pemeliharaan Berkala Jembatan									
		3	0	01	42		Jumlah Jembatan yang Dipelihara Secara Berkala	3 Jembata n	6 Jembata n	2.000.000.000,00	1.400.000.000,00	2.750.000.000,0 0	- 750.000.000	-37,50	
	1	0	1	2.	00	Survey Kondisi Jalan/Jembatan									
		3	0	01	43		Panjang Jalan/Jemb atan yang Disurvey Kondisinya	1017,15 KM	1017,15 KM	600.000.000,00	600.000.000,00	549.497.000,00	50.503.000	8,42	
	1	0	1	2.	00	Pemeliharaan Rutin Jalan									
		3	0	01	46		Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Rutin	10 KM	13,5 KM	13.681.801.000,00	13.328.158.000,0 0	18.301.134.000, 00	- 4.619.333.0 00	-33,76	
	1	0	1	2.	00	Pelebaran Jembatan									
		3	0	01	48		Jumlah Jembatan yang Dilebarkan	1 Jembata n	1 Jembata n	200.000.000,00	200.000.000,00	200.000.000,00	-	0,00	

8	1	0	1			PROGRA M PENGEM BANGAN JASA KONSTR UKSI	Persentase Penyedia Jasa Konstruksi yang Telah Dibina dan Nilainya Baik	64,92 %	64,92 %	150.754.000,00	101.114.000,00	93.044.000,00	57.710.000		
	1	0	1	2. 01		Penyelen ggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruk si	Jumlah kegiatan penyelenga raan pelatihan tenaga terampil konstruksi	2 Kegiatan	2 Kegiatan	100.000.000,00	50.360.000,00	50.360.000,00	49.640.000		
	1	0	1	2. 01	00 11	Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Jasa Konstruksi									
							Jumlah Lembaga Jasa Konstruksi yang Dibina dan Ditingkatka n Kapasitasny a	50 Lembaga	50 Lembaga	50.000.000,00	20.360.000,00	17.010.000,00	32.990.000		
	1	0	1	2. 01	00 16	Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator, Teknisi atau Analis									

						Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator, Teknisi atau Analis yang Dilatih	50 Orang	20 Orang	50.000.000,00	30.000.000,00	26.820.000,00	23.180.000		
	1	0	1	2.		Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah penyelenggaraan sistem informasi jasa konstruksi cakupan daerah kabupaten/kota	62 Kegiatan	62 Kegiatan	50.754.000,00	50.754.000,00	50.754.000,00	-	46,36
														0,00
	1	0	1	2.	00	Penyediaan Data dan Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Kabupaten/Kota								
						Jumlah Dokumen Data dan Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Kabupaten/Kota	1 Dokumen	1 Dokumen	50.754.000,00	50.754.000,00	49.214.000,00	1.540.000		3,03

							Kota yang Disediakan								
9	1	0 3	1 2			PROGRA M PENYEL ENGGAR AAN PENATAA N RUANG	Persentase Kesesuaian Lahan dengan Pola Ruang RTRW	91,55 %	91,45 %	858.191.000,00	791.201.000,00	666.392.000,00	191.799.000	22,35	
	1	0 3	1 2	2. 01		Penetapa n Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupate n/Kota	Jumlah dokumen rekomendas i RRRW dan RRTR Kabupaten/ Kota	2 Dokume n	2 Dokume n	662.264.000,00	258.398.000,00	258.398.000,00	403.866.000	60,98	
	1	0 3	1 2	2. 01	00 05	Pelaksanaan Persetujuan Substansi RTRW Kabupaten/Kota									
							Jumlah surat persetujuan	1 Dokume n	1 Dokume n	0,00	0,00	0,00	-	#DIV/ 0!	

							substansi RTRW Kabupaten/ Kota								
	1	0 3	1 2	2. 01	00 06	Pelaksanaan Persetujuan Substansi RDTR Kabupaten/Kota									
							Jumlah dokumen administrasi persetujuan substansi RDTR Kabupaten/ Kota	2 Dokume n	2 Dokume n	662.264.000,00	258.398.000,00	199.239.000,00	463.025.000	69,92	
	1	0 3	1 2	2. 02		Koordina si dan Sinkronis asi Perencan aan Tata Ruang Daerah Kabupate n/Kota	Jumlah kegiatan koordinasi penyusunan RTRW dan RRTR yang dilaksanaka n	12 Kegiatan	12 Kegiatan	67.497.000,00	419.373.000,00	419.373.000,00	- 351.876.000	- 521,3 2	
	1	0 3	1 2	2. 02	00 05	Penyusunan RDTR Kabupaten/Kota									
							Jumlah materi teknis dan ranperkada RDTR	1 Dokume n	1 Dokume n	45.497.000,00	397.373.000,00	350.042.000,00	- 304.545.000	- 669,3 7	

							Kabupaten/ Kota								
	1	0	1	2.	00	Peningkatan Peran Masyarakat dalam Penataan Ruang									
	3	2	02	08			Jumlah Kegiatan Peningkatan pemahaman dan tanggung jawab Masyarakat	2 Kegiatan	2 Kegiatan	22.000.000,00	22.000.000,00	19.950.000,00	2.050.000	9,32	
	1	0	1	2.		Koordina si dan Sinkronis asi Pemanfa atan Ruang Daerah Kabupate n/Kota	Jumlah dokumen pemanfaata n ruang yang tersusun	150 Dokume n	150 Dokume n	96.930.000,00	86.930.000,00	86.930.000,00	10.000.000	10,32	
	3	2	03	05	00	Pelaksanaan Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang									
							Jumlah dokumen sinkronisasi program pemanfaata n ruang	100 Dokume n	100 Dokume n	47.632.000,00	42.632.000,00	41.153.000,00	6.479.000	13,60	
	1	0	1	2.	00	Sistem informasi dan komunikasi penataan ruang									
	3	2	03	07											

							Jumlah sistem informasi dan komunikasi penataan ruang	1 Sistem Informasi	1 Sistem Informasi	49.298.000,00	44.298.000,00	36.686.000,00	12.612.000	25,58	
	1	03	12	2.04		Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kegiatan koordinasi pengendalian pemanfaatan ruang daerah kabupaten/kota	12 Kegiatan	12 Kegiatan	31.500.000,00	26.500.000,00	26.500.000,00	5.000.000	15,87	
	1	03	12	2.04	0004	Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang									
							Jumlah Dokumen Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	12 Dokumen	12 Dokumen	31.500.000,00	26.500.000,00	19.322.000,00	12.178.000	38,66	

	2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			37.000.000,00	30.000.000,00	20.830.000,00	16.170.000	43,70	
	2	10				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN			37.000.000,00	30.000.000,00	20.830.000,00	16.170.000	43,70	
10	2	10	04			PROGRA M PENYEL ESAIAN SENGKE TA TANAH GARAPA N	Persentase Penanganan Sengketa Lahan	100 %	100 %	37.000.000,00	30.000.000,00	20.830.000,00	16.170.000	43,70
	2	10	04	2.01		Penyeles aian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupate n/Kota	Persentase Penanganan Sengketa Lahan	100 %	100 %	37.000.000,00	30.000.000,00	30.000.000,00	7.000.000	18,92
	2	10	04	2.01	0004	Mediasi Penyelesaian Kasus Pertanahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota								

							Jumlah Berita Acara Hasil Mediasi Penyelesaia n Kasus Pertanahan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	2 Berita Acara	2 Berita Acara	37.000.000,00	30.000.000,00	20.830.000,00	16.170.000		
														43,70	
							J U M L A H			172.590.708.089,0 0	118.828.122.000, 00	210.364.976.583 ,00	- 37.774.268. 494	-21,89	

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kebumen, 2025

BAB V
PENUTUP

Rancangan Perubahan Rencana Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kebumen tahun 2025 merupakan dokumen perencanaan untuk perubahan anggaran tahun 2025, sebagai dokumen acuan bagi pelaksanaan kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kebumen yang berisikan program, kegiatan, sub kegiatan, indikator kinerja, lokasi, target, serta pagu indikatif dalam satu tahun anggaran berjalan. Dalam melaksanakan kebijakan, program dan kegiatan pembangunan diupayakan memaksimalkan sumber daya yang ada terutama sumber daya anggaran. Mengingat keterbatasan sumber daya anggaran pelaksanaan program dan kegiatan yang disusun dalam Rancangan Perubahan Rencana Kerja tahun 2025 harus dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien.

Rancangan Perubahan Rencana Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kebumen Tahun 2025 disusun berdasarkan acuan dan data-data konkrit dari dokumen-dokumen anggaran yang ada serta hasil konsultasi dan koordinasi dengan instansi terkait. Anggaran Rencana Kerja Murni yang semula Rp. 172.590.708.089,- (Seratus Tujuh Puluh Dua Milyar Lima Ratus Sembilan Puluh Juta Tujuh Ratus Delapan Ribu Delapan Puluh Sembilan Rupiah), anggaran APBD Rp. 118.828.122.000,- (Seratus Delapan Belas Milyar Delapan Ratus Dua Puluh Delapan Juta Seratus Dua Puluh Dua Ribu Rupiah) menjadi Rp. 210.364.976.583,- (Dua Ratus Sepuluh Milyar Tiga Ratus Enam Puluh Empat Juta Sembilan Ratus Tujuh Puluh Enam Ribu Lima Ratus Delapan Puluh Tiga Rupiah). Dengan adanya Rancangan Perubahan Rencana Kerja Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kebumen ini diharapkan penerapan dan pelaksanaan program serta kegiatan yang diemban oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kebumen dapat menjawab tantangan kebutuhan infrastruktur untuk kebutuhan ekonomi sesuai dengan tema Pembangunan 2025 yaitu “Peningkatan Sektor Pertanian, Industri dan Jasa melalui Pemanjatan Kualitas Pelayanan Publik dan Kualitas Sumber Daya Manusia”.

Demikian Rancangan Perubahan Rencana Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2025, yang menguraikan secara ringkas program dan kegiatan dalam upaya menterjemahkan visi dan misi yang diemban, untuk mendapat tanggapan dari segenap pihak yang berkepentingan di Kabupaten Kebumen semoga dengan tersusunnya dokumen rencana kerja ini dapat dijadikan acuan dalam pelaksanaan kegiatan dan dapat memberi manfaat bagi semua pihak yang terkait.

TELAH DIVERIFIKASI OLEH TIM BAPPERIDA	
NAMA	TANDA TANGAN

Kebumen,
KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM
DAN PENATAAN RUANG
KABUPATEN KEBUMEN

JONI HERNAWAN, ST, MT.
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19700728 199803 1 006

LAMPIRAN

LAMPIRAN 1 PRINT OUT RKPD PERUBAHAN 2025

LAMPIRAN 2 PRINT OUT USULAN POKIR PERUBAHAN TAHUN 2025

